© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

PENGARUH STABILITAS SOSIAL POLITIK, REFORMASI BIROKRASI DAN IKLIM INVESTASI TERHADAP MINAT PERUSAHAAN MODAL ASING BERINVESTASI DI INDONESIA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Program Studi Magister Manajemen

Oleh

Nama : HENDRI
NIM : 201361101

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWIJA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
JAKARTA
2015

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

ABSTRAK

HENDRI: PENGARUH STABILITAS SOSIAL POLITIK, REFORMASI BIROKRASI DAN IKLIM INVESTASI TERHADAP MINAT PERUSAHAAN MODAL ASING BERINVESTASI DI INDONESIA

Perkembangan perekonomian suatu negara sangat ditentukan dari tingkat pertumbuhan investasi asing. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah strategis demi menarik para investor berinvestasi di Indonesia.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh stabilitas sosial politik terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia. (2) Untuk mengetahui pengaruh reformasi birokrasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia. (3) Untuk mengetahui pengaruh iklim investasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia. (4) Untuk mengetahui pengaruh stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi dan iklim investasi secara simultan terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia.

Metode dalam penelitian ini adalah *explanatory research* tipe kausal yang berupaya menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara keseluruhan (sampel jenuh) dari jumlah populasi (*total sampling*) yaitu 50 orang top manajemen sebagai responden. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup dan pengolahan datanya menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS versi 16.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan stabilitas sosial politik terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia, dimana nilai koefisien regresi b_1 = 0,368 dan nilai sig (0,00). Ini dapat diartikan bahwa jika nilai stabilitas sosial politik meningkat sebesar satu maka nilai minat perusahaan modal asing berinvestasi juga akan meningkat sebesar 0.368. 2) Terdapat positif dan signifikan pengaruh reformasi birokrasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia, dimana nilai koefisien regresi b_2=0.650 dan nilai sig (0,000). Ini dapat diartikan bahwa jika nilai reformasi birokrasi meningkat sebesar satu maka nilai minat perusahaan modal asing berinvestasi juga akan meningkat sebesar 0.650. 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan iklim investasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia, dimana nilai koefisien regresi b_3=0.409 dan nilai sig (0,002). Ini dapat diartikan bahwa jika nilai iklim investasi meningkat sebesar satu maka nilai minat perusahaan modal asing berinvestasi juga akan meningkat sebesar 0.409. 4) Terdapat pengaruh yang signifikan stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi dan iklim investasi secara simultan terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia, dengan nilai sig (0,000). Besarnya nilai R Square (R^2) sebesar 0.760, yang menunjukkan bahwa sebesar 76% variabel stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi dan iklim investasi secara simultan berpengaruh terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia, sedangkan sisanya sebesar 24% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi, iklim investasi dan minat perusahaan modal asing berinvestasi

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

ABSTRACT

HENDRI :*THE EFFECT OF SOCIO-POLITICAL STABILITY, BUREAUCRATIC REFORM, AND INVESTMENT CLIMATE TO THE INTEREST OF FOREIGN CAPITAL COMPANIES TO INVEST IN INDONESIA*

The economic development of a country is highly determined by the growth rate of foreign investment. Therefore, the government continues to pursue various strategic in order to attract investors to invest in Indonesia..

The purpose of this research are: (1) To determine the influence of social and political stability to the interest of foreign capital companies to invest in Indonesia. (2) To determine the effect of bureaucratic reform to the interest of foreign capital companies to invest in Indonesia. (3) To determine the effect of the investment climate on the interest of foreign capital companies to invest in Indonesia. (4) To determine the influence of social and political stability, reform of the bureaucracy and climate of investment simultaneously on the interest of foreign capital companies to invest in Indonesia..

The method in this study is explanatory research causal type which attempted to examine the effect of the independent variable on the dependent variable. The sampling technique used in this research was totality (saturated sample) of the total population (total sampling) which is 50 top management as the respondents. The data were collected using a questionnaire enclosed then the data processing using multiple regression analysis with SPSS version 16.

The results of this study are: 1) There is a positive and significant influence of social and political stability on the interest of foreign capital companies to invest in Indonesia, where the value of regression coefficient b1 = 0.368 and value of sig (0.00). It can be interpreted that if the value of social and political stability increased by one, the value of the interest of foreign capital companies invest will also increase by 0368. 2) There is a positive and significant influence of bureaucratic reform on the interests of foreign capital companies to invest in Indonesia, where the regression coefficient value b2 = 0650 and sig value (0,000). It can be interpreted that if the value of bureaucratic reform increases by one the value of the interest of foreign capital company to invest will also increase by 0.650. 3) There is a positive and significant influence of investment climate on the interest of foreign capital companies to invest in Indonesia, where the value of the regression coefficient b3 = 0.409 and the value of sig (0.002). It can be interpreted that if the value of the investment climate increases by one the value of the interest of foreign capital company to invest will also increase by 0.409. 4) There is a significant simultaneously influence of social and political stability, reform of the bureaucracy and investment climate on the interests of foreign capital companies to invest in Indonesia, with the value of sig (0.000). The value of R Square (R2) is 0.760, which showed that 76% of variable such as social and political stability, reform of the bureaucracy and, investment climate simultaneously influenced the interests of foreign capital companies to invest in Indonesia, while the 24% rest is influenced by other factors which not examined in this research.

Keywords: socio-political stability, bureaucratic reform, investment climate, and interest of foreign capital companies to invest.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul: "Pengaruh Stabilitas Sosial Politik, Reformasi Birokrasi Dan Iklim Investasi Terhadap Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi Di Indonesia".

Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Program Pendidikan Magister Manajemen pada STIE IPWI Jakarta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Slamet Ahmadi, MM, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Suyanto, SE, MM, M.Ak, selaku Ketua STIE IPWI Jakarta.
3. Dr. Heru Mulyanto, SE, MM, selaku ketua Program Studi Magister Manajemen (MM) di STIE IPWI Jakarta.
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajar STIE IPWI Jakarta.
5. Bapak dan Ibu Staf Karyawan STIE IPWI Jakarta
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan thesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Jakarta, 20 Maret 2015

Penulis,

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN ..... **ii**
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI ..... **iv**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB 1 : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 9
1.3. Tujuan Penelitian 10
1.4. Manfaat Penelitian 10
1.5. Sistematika Penulisan 11

BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 13
2.1.1. Manajemen Strategi 13
2.1.2. Stabilitas Sosial Politik 21
2.1.3. Reformasi Birokrasi 28
2.1.4. Iklim Investasi 38
2.1.5. Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi 42
2.2. Penelitian Terdahulu 59
2.3. Kerangka Pemikiran 62
2.4. Hipotesis Penelitian 63

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 64
3.2. Desain Penelitian 64
3.3. Operasionalisasi Variabel..... 66
3.4. Populasi, Sampel dan Metode Sampling..... 67
3.4.1. Populasi 67
3.4.2. Sampel 69
3.4.3. Metode Sampling 69
3.5. Metode Pengumpulan Data 69
3.6. Instrumen Variabel 71
3.7. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis..... 73

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian..... 80
4.1.1. Gambaran Objek Penelitian 80
4.1.2. Karakteristik Responden..... 90
4.1.3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 91
4.1.4. Deskripsi Variabel Penelitian 97
4.1.5. Analisis Data..... 99
4.1.6. Pengujian Hipotesis..... 105
4.2. Pembahasan 107
4.3. Implikasi Manajerial 109

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan..... 110
5.2. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Area Tujuan Reformasi Birokrasi.....	36
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian Penyusunan Tesis.....	64
Table 3.2	Kisi-kisi Instrumen Penelitian	66
Tabel 3.3	Jumlah Populasi	68
Tabel 3.4	Skala Likert yang Digunakan	71
Tabel 4.1	Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	90
Tabel 4.2	Uji Validitas Variabel Stabilitas Sosial Politik (X_1).....	91
Tabel 4.3	Uji Validitas Variabel Reformasi Birokrasi (X_2)	92
Tabel 4.4	Uji Validitas Variabel Iklim Investasi (X_3).....	93
Tabel 4.5	Uji Validitas Variabel Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi (Y).....	94
Tabel 4.6	Hasil Uji reliabilitasVariabel Stabilitas Sosial Politik (X_1) ..	95
Tabel 4.8	Uji reliabilitasVariabel Iklim Investasi (X_3)	95
Tabel 4.7	Uji reliabilitasVariabel Reformasi Birokrasi (X_2)	96
Tabel 4.9	Uji reliabilitasVariabel Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi (Y).....	96
Tabel 4.10	Kategori Nilai Rata-rata Variabel Penelitian	97
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Stabilitas Sosial Politik (X_1)	97
Tabel 4.12	Distribusi Frekuensi Reformasi Birokrasi (X_2)	98
Tabel 4.13	Distribusi Frekuensi Iklim Investasi (X_3)	98
Tabel 4.14	Distribusi Frekuensi Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi (Y).....	99

Tabel 4.15	Hasil Uji Multikolinearitas	100
Tabel 4.16	Hasil Uji Normalitas	101
Tabel 4.17	Tabel Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	102
Tabel 4.18	Hasil Uji Autokolerasi	102
Tabel 4.19	*Coefficient*	103
Tabel 4.20	Model Summary	104
Tabel 4.21	Anova	106

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Manajemen Strategi 16

Gambar 2.2 Proses Manajemen Strategi 18

Gambar 2.3 Model Manajemen Strategi *Pearce* & *Robinson* 20

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 62

Gambar 3.1 Disain Penelitian 65

Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 90

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 100

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kuesioner (Bahasa Indonesia)

Lampiran 1 Lembar Kuesioner (Bahasa English)

Lampiran 2 Tabulasi Data Jabawan Responden (Skor Variabel)

Lampiran 3 Output SPSS

Lampiran 4 Output SPSS Uji Persyaratan

Lampiran 5 *Correlations*

Lampiran 6 Tabel Nilai "r"

Lampiran 7 Tabel Nilai "t"

Lampiran 8 Tabel Nilai "f"

Lampiran 9 Tabel Durbin Watson 0.05

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Investor senantiasa mencari cara untuk memberdayakan modal yang ada sehingga tidak menjadi statis, melainkan semakin bertambah tinggi nilainya. Ketika modal yang diinvestasikan di negara asal sudah tidak lagi dapat mencapai hasil keuntungan maksimum yang dikehendaki maka penanaman modal dengan melewati batas negara (investasi asing) akan menjadi suatu pilihan yang menarik bagi investor.

Pembangunan dan kegiatan investasi merupakan dua hal yang sulit dipisahkan, pembangunan tanpa kegiatan investasi berarti mengurangi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan investasi yang tinggi dan berkesinambungan dibutuhkan untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pula. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta mempercepat pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan modal yang sangat besar. Kebutuhan modal yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Investasi asing merupakan salah satu faktor utama untuk

mencapai peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagi negara berkembang.

Dinamika penanaman modal asing mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, demi meningkatkan penanaman modal asing, maka setiap daerah akan terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal asing. Iklim investasi adalah semua hal yang berhubungan dengan kebijakan, kelembagaan dan lingkungan baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Ada tiga faktor utama dalam iklim investasi yang pertama kondisi ekonomi makro, yang mencakup stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial politik; Kedua, pemerintahan dan kelembagaan, yang mencakup kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil; Ketiga, infrastruktur, yang mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air (Asian Development Bank, 2005).

Usaha-usaha pemerintah dalam menarik Penanaman Modal Asing. Dalam prakteknya sekarang ini dalam menarik FDI menanamkan modalnya kebijakan dilakukan sangat-sangat liberal dan memberikan semuanya kepada mekanisme pasar seperti:

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

a. Pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang antara lain memuat mengenai: Jangka waktu yang lebih lama pada hak guna tanah: dalam Undang-Undang yang baru, maksimum hak guna untuk pengolahan tanah, hak guna bangunan dan penggunaan tanah diperpanjang, dari 35, 30 dan 25 menjadi 95, 80, dan 75 tahun, Ketentuan perlakuan secara nasional: Undang-Undang tersebut memberikan dasar yang merata untuk perlakuan yang sama antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

b. Di bidang fasilitas Pajak Penghasilan, pada tanggal 15 Agustus tahun 2011 Pemerintah telah meluncurkan kebijakan pemberian insentif pajak untuk penanaman modal berupa Tax Holiday bagi industri pionir melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-130/PMK.011/2011.

c. Untuk memberi alternatif fasilitas Pajak Penghasilan di samping Tax Holiday dan memperluas bidang usaha atau daerah tertentu yang berhak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, pada tanggal 22 Desember 2011, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan insentif perpajakan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. PP 52 tahun 2011 merupakan revisi kedua dari PP No 1 Tahun 2007, yang pada dasarnya merupakan paket kebijakan pemberian insentif berupa *investment allowance*, bagi industri yang mendapat prioritas tinggi dalam skala

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

nasional. Revisi pertama PP Nomor 1 tahun 2007 diberikan oleh PP nomor 62 tahun 2008. Pembahasan PP 52 tahun 2011 telah melibatkan seluruh instansi terkait dibawah koordinasi Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian.

d. Perundang-undangan bidang ekonomi yang ditetapkan pemerintah Indonesia, seperti UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tentang larangan ekspor mineral dalam bentuk mentah, ataupun UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur lebih ketat perdagangan internasional, memiliki landasan untuk menarik investasi yang berkualitas bagi Indonesia.

e. Kebijakan Daftar Negatif Investasi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014, yang untuk memperketat ketentuan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka.

Kebijakan investasi di Indonesia pada dasarnya merujuk pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Esensialisasi Pasal 33 UUD 1945 adalah perekonomian Indonesia berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Hal itu merupakan penuangan yuridis konstitusional dari amanat yang dikandung di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia kebijakan investasi ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dinyatakan berlaku di Undangkan pada tanggal 26 April 2007. Sebelum lahirnya Undang-Undang ini telah ada Undang-Undang lain yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang kemudian diubah dan

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 1970 tentang Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN).

Menurut Tambunan (2006) dalam Zaenuddin (2009:156-157) terdapat sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi serta adanya kepastian dari kebijakan pemerintah.

Minat perusahaan modal asing untuk menanamkan modalnya pada suatu negara, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

a. Kondisi kestabilan sosial politik maupun keamanan suatu negara;
b. Kemudahan proses birokrasi dan pengurusan perijinan usaha;
c. Komprehensifitas kebijakan pemerintah yang pro investor;
d. Insentif penanaman modal asing yang lebih kompetitif;
e. Adanya jaminan dan perlindungan penanaman modal asing;
f. Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah;

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

g. Adanya pasar yang prospektif

h. Biaya produksi yang murah

i. Iklim investasi yang mendukung seperti kondisi ekonomi makro yang stabil, tersedianya infrastruktur baik transportasi darat maupun laut, fasilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, tersedia pasokan air bersih, serta kondisi kesiapan tenaga kerja.

Dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia sebagaimana yang dijabarkan diatas, penelitian ini hanya meneliti pengaruh faktor kestabilan sosial politik, faktor reformasi birokrasi dan faktor iklim investasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia, faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi minat investor asing di Indonesia tidak diteliti dalam penelitian ini.

Stabilitas sosial politik di Indonesia merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia. Sering terjadinya kerusuhan yang bernuansa SARA di beberapa provinsi, serta gerakan-gerakan yang mengarah ke disintegrasi bangsa, ditambah terjadinya peledakan bom dibeberapa tempat juga menjadi isu penting yang menjadi sorotan utama. Perangkat hukum yang tersedia belum seluruhnya dapat mengakomodir kepentingan investor, serta penegakan hukum yang secara keseluruhan masih mencerminkan belum adanya kepastian hukum di negeri ini. Belum lagi kondisi politik yang kurang stabil yang memungkinkan sewaktu-waktu dapat terjadi pergantian peraturan perundang-undangan maupun kekuasaan, hal tersebut dapat terjadi baik di

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

pusat maupun di daerah. Pergantian pimpinan yang biasanya diikuti dengan peraturan barunya, dapat merugikan investor yang harus menyesuaikan strategi investasinya dengan kebijakan baru tersebut, dengan akibat adanya tambahan biaya yang nantinya berdampak pada tingginya biaya produksi. Hal inilah yang mengakibatkan investor lebih memilih untuk tidak mengambil resiko dengan menanamkan modalnya ke negara tujuan investasi yang sedang mengalami instabilitas sosial politik.

Reformasi birokrasi merupakan langkah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Penyelenggaraan birokrasi pemerintahan pada tatanan sistem reformasi birokrasi, menjadi alternatif kekuatan baru yang dapat menyentuh kebijakan-kebijakan pembangunan segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, investasi merupakan faktor yang kuat dalam mendongkrak pergerakan ekonomi. Dan konteks investasi sebagai kekuatan dalam akselerasi pembangunan diberbagai daerah, maka investasi dibutuhkan konsepsi dan *good will* yang komprehensif dan masif yang harus dimulai oleh pemerintah itu sendiri, dan agenda reformasi birokrasi baik di Pemerintah Pusat dan daerah diharapkan mampu menjawab akselerasi investasi di daerah.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan mengingat bahwa untuk menarik minat investasi asing, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dan kompleks, serta persaingan yang semakin tajam dan kompetitif baik dari sesama negara berkembang maupun dari negara maju.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di Indonesia sendiri juga ada beberapa penelitian terkait penanaman modal asing diantaranya seperti yang dilakukan oleh Sitinjak (2011) yang meneliti analisa faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia selama kurun waktu 1990 sampai 2010, penelitian Lubis (2008) yang meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan investasi di Indonesia, serta penelitian Bank Indonesia dalam *working paper* No. 6 Agustus 2007 yang disusun oleh Kurniati, dkk (2007) yang meneliti determinan FDI. Namun penelitian dengan variabel Stabilitas Sosial Politik, Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi dalam mempengaruhi Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi di Indonesia belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Stabilitas Sosial Politik, Reformasi Birokrasi Dan Iklim Investasi Terhadap Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi Di Indonesia".**

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan diteliti, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh stabilitas sosial politik terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh reformasi birokrasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh iklim investasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi dan iklim investasi secara simultan terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia?

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitan ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh stabilitas sosial politik terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh reformasi birokrasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh iklim investasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi dan iklim investasi secara simultan terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi, iklim investasi dan minat perusahaan modal asing untuk berinvestasi di Indonesia.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

b. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di bidang Manajemen Strategik khususnya yang berkaitan dengan stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi, iklim investasi dan minat perusahaan modal asing untuk berinvestasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai input bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi, iklim investasi dan minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna meningkatkan minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab berisi hal-hal berikut:

1. Bab 1. Merupakan bab pendahuluan yang mencakup: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab 2. Berisi uraian mengenai kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis yang digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

3. Bab 3. Berisi uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode dalam penelitian ini, seperti: prosedur pengumpulan data, dan serta analisis data yang digunakan.
4. Bab 4. Berisi uraian mengenai hasil penelitian dan analisis atau pembahasan hasil penelitian. Dalam hal ini, mengetengahkan penjelasan deskripsi mengenai objek penelitian, yakni Investor di Indonesia disamping itu, juga penjelasan tentang analisis atau pembahasan hasil penelitian, berupa data-data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, khususnya pembahasan mengenai analisis kolerasi dan regresi dan tentang implikasi manajerialnya.
5. Bab 5. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Manajemen Strategik

1. Pengertian Manajemen Strategik

Tuntutan reformasi di segala bidang telah membawa dampak terhadap perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah dituntut membuat perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, rasional, tepat sasaran, dapat dilaksanakan, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk dituangkan dalam perumusan dan penetapan kebijakan-kebijakan strategis, yang mana tentu saja memerlukan kajian dan analisis mendalam terhadap berbagai aspek agar solusi yang diambil merupakan solusi yang terbaik dan mampu menjawab setiap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pemahaman terhadap manajemen strategik secara utuh sangat erat kaitannya dengan fungsi dan peran yang diemban pemerintah sebagai *strategic managers*.

Strategi memiliki kaitan yang erat dengan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga strategi berkembang menjadi manajemen strategi. Menurut John A. Pearce II dan Richard B.

Robinson, Jr. yang dialihbahasakan oleh Agus Maulana (1997:20), manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan.

Sementara itu, Don Harvey dalam bukunya yang berjudul: "*Business policy and Strategic Management*", menyatakan pandangan-pandangan berikut tentang manajemen strategik. Manajemen strategik berhubungan dengan proses memilih strategi dan kebijakan dalam rangka upaya memaksimasi sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan. Manajemen strategik meliputi semua aktivitas yang menyebabkan timbulnya perumusan sasaran-sasaran organisasi, strategi-strategi dan pengembangan rencana-rencana, tindakan-tindakan dan kebijakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategik tersebut untuk organisasi yang bersangkutan secara total.

Husein Umar (2006:86) menyatakan bahwa manajemen strategik adalah suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (*formulating*) penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya di masa datang. Glueck & Jauch (2001:6) menyebutkan bahwa manajemen strategi adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.

Pengertian manajemen strategi yang lebih rinci dinyatakan oleh Mulyadi (2001:40); Manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan *costumer value* terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Dari definisi tersebut terdapat empat (4) frasa penting berikut ini:

a. Manajemen strategi merupakan suatu proses
b. Proses digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi.
c. Strategi digunakan untuk menyediakan *costumer value* terbaik guna mewujudkan visi organisasi.
d. Manajer dan karyawan adalah pelaku manajemen strategi.

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian (2005:15) dalam bukunya "Manajemen Strategik" definisi manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Dari berbagai pengertian atau definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa Manajemen Strategik adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

(*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang.

2. Proses Manajemen Strategik

Dalam bukunya Operasionalisasi Strategi (2006), Jemsly Hutabarat & Martani Huseini, menjelaskan proses manajemen strategik terdiri dari beberapa proses yaitu arsitektur strategi, transformasi strategi dan implementasi strategi.

Gregory G. Dess, G. T. Lumpkin dan Marilyn L. Taylor, dalam bukunya *Strategic Management*: *Creating Competitive Advantages*, yang didasarkan dari penelitian H. Mintzberg and J. A. Waters, "*Of Strategies, Deliberate and* Emergent" dalam *Strategic Management* Journal 6 (1985), pp. 257-72, menjelaskan proses manajemen strategi sebagai berikut:

Gambar 2.1

PROSES MANAJEMEN STRATEGIK

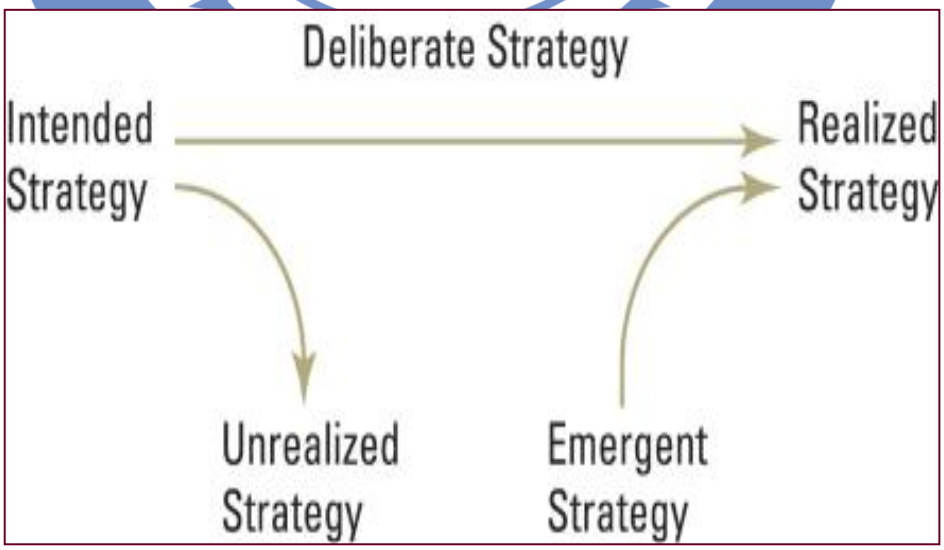

Sumber: H. Mintzberg and J. A. Waters, "Of Strategies, Deliberateand Emergent," *Strategic Management Journal 6* (1985), pp. 257-72

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Gordon E. Greenley (dalam Mulyadi dan Johny Setiawan, 2001:496) menyatakan proses manajemen strategi terdiri dari empat (4) tahap utama :

a. *Analysing the environment.*

b. *Planning direction.*

c. *Planning strategy.*

d. *Implementing strategy.*

Menurut Jauch dan Glueck (2008:6) proses manajemen strategi adalah: "Cara atau jalan dimana para perencana strategi menentukan sasaran dan mengambil keputusan". Beberapa tahapan penting yang dirumuskan, yaitu :

a. Menetapkan misi dan tujuan perusahaan

b. Meneliti ancaman dan peluang

c. Meneliti kekuatan dan kelemahan

d. Mempertimbangkan alternatif strategi

e. Memilih strategi

f. Implementasi strategi

g. Evaluasi strategi

Mudrajad Kuncoro (2006), dalam bukunya *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif* , untuk proses manajemen strategi ada empat tahapan, seperti tampak pada gambar berikut:

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Gambar 2.2

PROSES MANAJEMEN STRATEGI

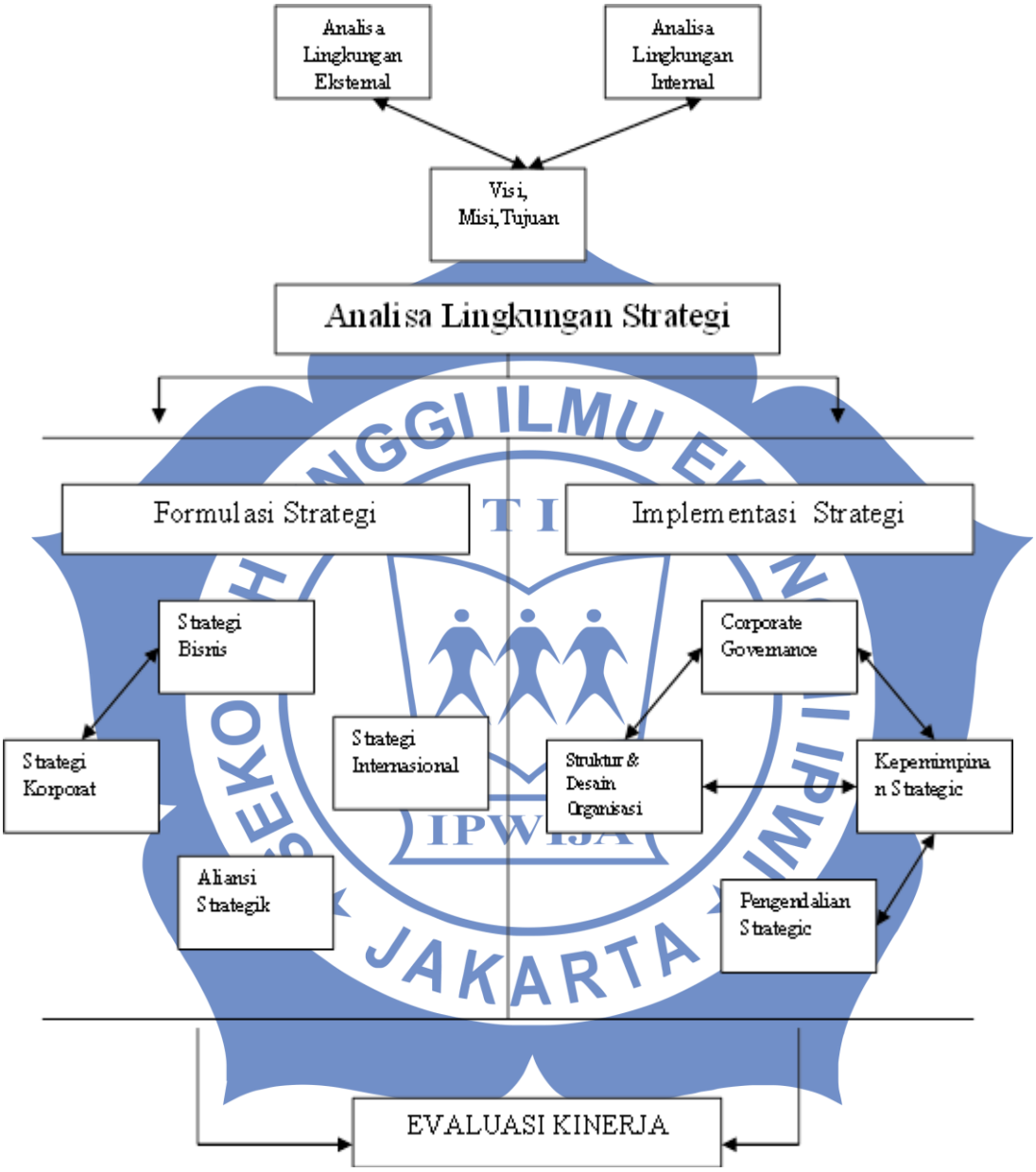

Sumber: Kuncoro, Mudrajat, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Penerbit Erlangga, 2006

Sementara itu proses manajemen strategi menurut Pearce dan Robinson (2007:20), mengandung sembilan tugas penting yaitu :

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

a. Merumuskan misi perusahaan, meliputi rumusan umum tentang maksud keberadaan (*purpose*), filosofi (*phylosophy*), dan tujuan (*goal*).

b. Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi intern dan kapabilitasnya.

c. Menilai lingkungan ekstern perusahaan, meliputi baik pesaing maupun faktor-faktor kontekstual umum.

d. Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya dengan lingkungan ekstern.

e. Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan.

f. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum (*grand strategy*) yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki.

g. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih.

h. Mengimplementasikan pilihan strategik dengan mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian.

i. Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Gambar 2.3

MODEL MANAJEMEN STRATEGI PEARCE & ROBINSON

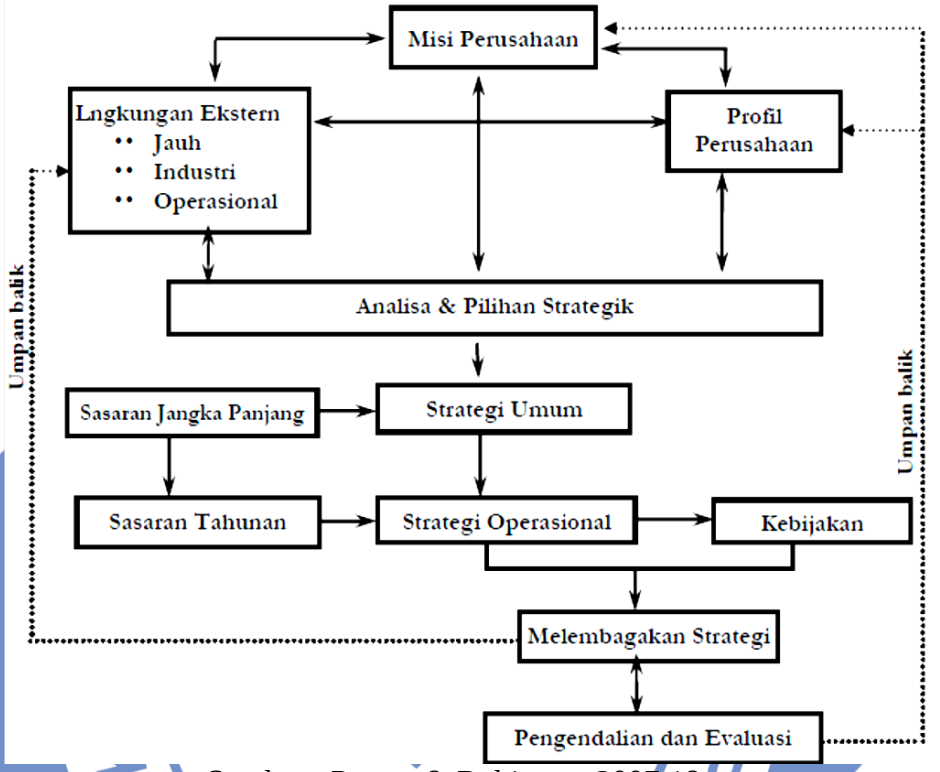

Sumber : Pearce & Robinson, 2007:18.

Dengan beberapa model manajemen strategik di atas, maka dapat diketahui bahwa manajemen strategik merupakan suatu proses yang saling terkait antara satu dengan yang lain dan bekerja saling berurutan. Melalui tahapan-tahapan dalam sistem manajemen strategik, yang dimulai dari perencanaan strategi, formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi, maka akan menghasilkan suatu rumusan strategi, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi yang tersistem.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

2.1.2. Stabilitas Sosial Politik

Prasyarat mutlak untuk pembangunan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa adalah stabilitas sosial dan politik. Menurut Baswir (2009:23), struktur perekonomian Indonesia masih ditandai dengan terjadinya dualisme ekonomi, yaitu ekonomi modern yang berorientasi kepada pengakumulasian kapital, dan perekonomian yang masih tradisional bersifat sub sistem. Oleh karena itu, untuk memajukan perekonomian di Indonesia sangat diperlukan investasi yang besar baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, investor tidak akan datang jika situasi di suatu daerah atau suatu negara penuh gejolak. Sementara sektor primer modern yang ada belum memadai untuk menampung serta memanfaatkan sumber-sumber daya manusia desa, yang merupakan bagian terbesar penduduk di Indonesia.

Jack C. Palno (dalam *Kamus Analisa Politik*, 1989:249) mendefinisikan stabilitas sebagai suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung ke dalam, atau kembali kepada suatu hubungan yang sudah mantap. Stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau didalam suatu sistem politik, atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau telah ditentukan. Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1996:96) stabilitas adalah "menciptakan suatu kestabilan nasional yang dinamis, bukanlah semata-mata tugas pemerintah dan aparatnya, melainkan tugas segenap anggota masyarakat". W. J. S.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Poerwadarminto (2003:144) stabilitas merupakan kemantapan, kestabilan, keamanan politik dan ekonomi perlu bagi terlaksananya rencana pembangunan dalam suatu negara.

Stabilitas sangat diperlukan pada suatu negara atau wilayah agar tercipta antar negara atau kawasan berjalan dengan tertib, Rizal Sukma dalam T May Rudy (2002:119) menjelaskan bahwa stabilitas politik adalah "suatu kondisi yang ditandai kemampuan sistem regional atau internasional untuk mencegah setiap kemampuan atau tindakan dekstruktif oleh kekuatan dari luar atau dari dalam sistem, tidak hanya dengan cara menentang atau menghindari perubahan, tetapidengan menyesuaikan diri terhadap perubahan melalui pengetahuan kembali".

Secara etimologis, politik berasal dari kata *polis* (bahasa Yunani), yang artinya negara kota. Namun kemudian dikembangkan dan diturunkan menjadi kata lain seperti *polities* (warga negara), *politikos* (kewarganegaraan atau civic), dan *politike tehne* (kemahiran politik), dan *politike epistem* (ilmu politik), (Cholisin, 2003:1).

Dalam bukunya, Miriam Budiardjo (2001:8) mengatakan bahwa politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti (1992:11), politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Stabilitas politik dapat dipahami sebagai kondisi dimana tidak ada timbulnya perubahan mendasar atau apa yang revolusioner dalam sistem politik (pemerintah), atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah ditentukan (Jack C. Palno, 1985:49). Secara teoritis, stabilitas politik banyak ditentukan oleh tiga variabel yang berkaitan satu sama lain, yakni: perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan pelembagaan baik struktur maupun struktur politik dan partisipasi politik (T May Rudy, 2002:119-120). Situasi politik yang stabil dan kondusif merupakan prasyarat utama menuju pemulihan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Harapan publik terhadap stabilitas politik sangat menentukan keputusan-keputusan ekonominya.

Sedangkan sosial, secara definitif dapat diartikan kemasyarakatan atau suatu keadaan yang menghadirkan orang lain dalam kehidupan manusia. Menurut Weber, sosiologi adalah ilmu tentang perilaku sosial, perilaku sosial terjadi dikarenakan pergeseran ke arah keyakinan, motivasi dan tujuan dari anggota masyarakat, yang semuanya memberi isi dan bentuk kepada kelakuannya. Dalam sosiologi, paradigma definisi sosial merupakan suatu cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif, dimana eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

melakukan suatu tindakan. Perilaku sosial yang dapat diterima masyarakat dipandang sebagai perilaku yang memberikan efek positif dalam masyarakat, seperti menolong, berbuat baik, atau disebut dengan perilaku prososial, dan perilaku sosial yang tidak dapat diterima dipandang sebagai perilaku yang memberikan efek negatif dalam masyarakat atau disebut dengan perilaku antisosial (Baumeister & Bushman, 2011). Dengan kata lain, sosial dapat diartikan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Kekuatan sosial mencakup tradisi, nilai, trend sosial, psikologi konsumen, dan harapan masyarakat terhadap bisnis. Tradisi membatasi praktik-praktik sosial untuk jangka waktu yang panjang, sepuluh bahkan sampai ratusan tahun.

Stabilitas sosial politik berkaitan erat dan sangat menentukan kelangsungan kebijakan pemerintah dan program pembangunan. Bahkan, menurut T May Rudy (2002:118), stabilitas politik merupakan kondisi prasyarat untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang dalam tatanan global atau sistem internasional. Oleh karena itu, stabilitas sosial politik bukanlah suatu hal yang statis, tetapi bersifat dinamis di mana dinamikanya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang dan berubah. Perkembangan isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM, terorisme, kemiskinan, maupun konflik komunal

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

yang disebabkan oleh isu sara telah memperluas cara pandang dan konsepsi stabilitas sosial politik.

Jadi, dapat disimpulkan stabilitas sosial politik merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif atau stabil dalam bidang sosial dan politik sehingga kebijakan dan program-program pemerintah untuk menyukseskan pembangunan ekonomi dapat dijalankan secara optimal.

Banyak penelitian yang telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing di negara-negara berkembang, namun kebanyakan penelitian hanya meneliti variabel ekonomi saja dan mengabaikan atau memberikan pertimbangan terbatas pada variabel stabilitas sosial politik (Schneider dan Frey, 1985). Tallman (1988) dalam penelitiannya menemukan adanya signifikansi pengaruh stabilitas sosial politik terhadap investasi asing. Jun dan Singh (1996) berpendapat bahwa instabilitas sosial politik adalah fenomena kualitatif dan pengukuran yang tepat dari masalah rumit dalam hal apa yang dianggap investor sebagai resiko politik dan kendala bagi investasi mereka.

Dalam penelitian praktek bisnis telah ditunjukkan oleh banyak peneliti betapa krusialnya faktor sosial politik. Perubahan-perubahan dramatis dalam kondisi sosial politik masyarakat dapat membawa dampak negatif bagi investor.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Keadaan sosial politik yang tidak stabil akan mengakibatkan investasi menjadi lebih berisiko dan tidak pasti. Instabilitas politik akan mengurangi minat para investor dan aktivitas ekonomi lainnya (Dash dan Raja, 2009). Hal ini sesuai dengan konsep faktor politik pada manajemen strategik, karena investor lebih berminat melakukan penanaman modalnya di tempat yang lebih stabil secara politis.

Investor asing cenderung menanamkan modalnya di negara dengan keadaan politik pemerintahan yang stabil. Jika investor merasa keadaan pemerintahan dapat mempengaruhi bisnis mereka, investor asing akan berpindah ke negara lain yang memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, di mana hal ini tercermin pada keadaan politiknya (Kuncoro, 2000; Sartono, 2001). Stabilitas sosial politik didefinisikan sebagai sebuah lingkungan kondusif dari suatu negara baik secara sosial, ekonomi, dan politik (Selvarathinam dkk, 2007:1030).

Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa kondusif pengaruh variabel faktor sosial politik terhadap daya tarik investasi suatu daerah, yaitu:

a. Indikator Keamanan

Adalah situasi keamanan di daerah yang mempengaruhi kegiatan usaha/investasi, yang dapat mendukung atau menghambat aktivitas usaha/investasi dan jaminan keselamatan jiwa maupun harta. Kondisi keamanan dapat diukur dari rasa aman dan tingkat

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

gangguan keamanan terhadap dunia usaha maupun terhadap lingkungan masyarakat tempat usaha, serta kecepatan aparat dalam menanggulangi gangguan keamanan.

b. Indikator Sosial Politik

Kondisi sosial politik adalah keadaan di daerah yang merupakan hasil relasi antar pranata-pranata dalam satu sistem sosial di daerah, baik antar pranata politik dan pemerintahan, antara pranata sosial di masyarakat, maupun antara pranata formal dalam pemerintahan maupun antara elemen-elemen masyarakat. Beberapa aspek yang membentuk kondisi sosial politik daerah diantaranya adalah: keterbukaan birokrasi terhadap partisipasi dunia usaha dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingannya, konflik sosial antar kelompok masyarakat, stabilitas politik, dan kegiatan unjuk rasa.

c. Indikator Budaya Masyarakat

Budaya merupakan seperangkat ide atau gagasan yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang mendasari atau mengilhami perilaku atau tindakan orang, baik secara individu maupun kolektif dari anggota kelompok tersebut. Yang diperlukan oleh investor yang akan masuk ke suatu daerah adalah nilai-nilai budaya masyarakat yang terbuka terhadap masuknya dunia usaha, adanya kondisi dimana masyarakat tidak antipati terhadap suatu investasi usaha. Selain keterbukaan, perilaku non diskriminatif dari

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

masyarakat setempat dengan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan asal usul, ras, agama, gender dalam kegiatan di setiap sektor. Etos kerja masyarakat, dalam pengertian kemauan kerja keras, persaingan untuk berprestasi, jujur dan mau/mudah untuk dibina; juga menjadi pertimbangan investor untuk membuka usaha di suatu daerah. Bila masyarakat setempat mempunyai etos kerja yang baik maka akan memudahkan investor dalam perekrutan pekerja tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah tersebut. Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh investor adalah adat istiadat, khususnya adat istiadat masyarakat setempat yang tidak mengganggu produktivitas usaha.

2.1.3. Reformasi Birokrasi

1. Pengertian Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Kegagalan-kegagalan dalam pemerintahan, seperti ketidakefisienan

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

birokrasi, intervensi pemerintah yang berlebihan, dan kurang dijalankannya peranan hukum serta praktik korupsi akan mengurangi stabilitas pemerintahan. Dalam jangka panjang, hal ini akan berpengaruh kepada minat investor asing yang akan menanamkan modal (Lambsdorff, 2002). Penanaman modal yang ada baik berasal dari dalam maupun luar negeri mengharapkan proses perijinan penanaman modal yang mereka lakukan berjalan dengan cepat dan murah. (Akhmaddhian, 2012)

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Kebijakan reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya pembentukan profil birokrasi yang efisien, mampu, tanggap dan dinamis terhadap tuntutan yang ditujukan kepada birokrasi itu sendiri, baik berasal dari lingkup nasional, regional dan internasional yang berjalan kearah *good governance* (Rewansyah, 2010;149). Paradigma Good Governance (kepemerintahan yang baik) menjadikan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi sebagai tolok ukur dalam pelayanan sektor publik.

Menurut Rewansyah (2008:97), sasaran reformasi birokrasi adalah membentuk:

a. Birokrasi yang bersih (bebas dari praktek KKN melalui pembenahan sistem pengelolaan anggaran, perbaikan kesejahteraan pegawai, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum);
b. Birokrasi yang efisien dan efektif (dilakukan melalui program penghematan penggunaan sumberdaya, metoda dan waktu);
c. Birokrasi yang transparan (pembukaan ruang publik dan publik dapat mengakses secara luas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum);
d. Birokrasi yang melayani (pengubahan birokrasi yang primodialisme atau minta dilayani menjadi birokrasi yang melayani masyarakat);
e. Birokrasi yang terdesentralisasi (pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada aparatur terdepan).

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan konstitusi. Perubahan kearah yang lebih baik, merupakan cerminan dari seluruh kebutuhan yang bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut KEMENPAN, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara yang professional, memliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan sosial.

Reformasi birokrasi bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

pada masyarakat banyak. Proses reformasi yang harus dilakukan birokrasi nampaknya bukan hal yang mudah karena harus menformat ulang dengan penuh kritik dan tindakan korektif struktur dan konfigurasi birokrasi itu dari yang serba sakral feodal ke serba priyayi ke arah birokrasi dengan konfigurasi otoritas yang rasional yang dalam tataran empirik dari budaya minta dilayani menjadi budaya melayani abdi masyarakat (*public service*).

Menurut Sofian Efendi dalam (Miftah Thoha, 2007:18), untuk menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, dan responsif dalam rangka mendukung tata kepemerintahan yang demokratis serta ekonomi nasional, pemerintah seharusnya menerapkan strategi kelembagaan reformasi birokrasi yang bertujuan:

a. Memantapkan kelembagaan reformasi birokrasi;
b. Meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan manajeman berbasis kinerja;
c. Membangun kapasitas aparatur negara untuk menciptakan pelayanan publik yang maksimal;
d. Organisasi dan sumber daya manusia aparatur yang profesional, apolitikal, netral, transparan, dan akuntabel.

Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan lagi untuk hanya terfokus kepada fungsi, tugas prinsip pelayanan publik. Birokrasi harus netral dan bukan sebagai alat politik sehingga

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

ia bebas untuk bersinergi dan berinteraksi dengan pengguna jasa yang pada hakikatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat.

Untuk merespon secara tepat isu-isu pokok tata kepemerintahan yang baik dan meningkatkan kapasitas birokrasi publik yang akan berkembang, maka dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu penerapan reformasi pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik diarahkan pada peningkatan cakupan dan mutu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*. Melihat pengalaman sejumlah Negara menunjukan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efesien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi memang akan diterapkan dijajaran kementerian dan lembaga pemerintah.

Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik serta integritas

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

2. Penyebab Munculnya Reformasi Birokrasi

Menurut Miftah Thoha (2008:106-108), ia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang bisa mendorong terjadinya reformasi birokrasi, yaitu :

a. Adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan.

Adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan aparatur Negara dan pemerintah itu sangat tergantung dari kebutuhan dari pimpinan nasional kita. Jika pimpinan politik nasional merasa butuh untuk dilakukan perubahan, pasti perubahan itu akan terwujud. Kebutuhan itu didukung oleh kebijakan politik yang strategis dan dijadikan suatu program nasional dengan dukungan seluruh komponen rakyat.

b. Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional.

Perubahan lingkungan strategis nasional Indonesia adalah, terjadi krisis ekonomi/moneter dan perubahan sistem politik nasional. Dua kejadian ini yang perlu dijadikan dorongan dan rencana adanya perubahan dan pembaruan aparatur.

c. Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis global.

Perubahan lingkungan strategis global tidak berdiri sendiri, ia memperhatikan faktor perubahan global. Perubahan global antara lain sistem desentralisasi dan demokrasi yang sedang banyak

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

dipakai oleh negara-negara yang menginginkan juga terjadinya kepemerintahan yang baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang mulai diterapkan dalam pemerintahan yang elektronik.

d. Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan.

Perubahan global sangat erat kaitannya dengan paradigma tata kelola pemerintah yang baik. Desentralisasi, otonomi, demokrasi, akuntabilitas publik, transparansi, dan ditegakkannya hukum merupakan dorongan-dorongan yang kuat terhadap lahirnya perubahan dalam lahirnya manajemen pemerintah.

3. Tujuan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Area Tujuan Reformasi Birokrasi

Area	Hasil yang diharapkan
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip prinsip *good governance*
Peraturan perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya kapasistas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir dan Budaya Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

4. Kunci Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Beberapa kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi terletak pada beberapa hal berikut :

a. Komitmen Nasional untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik

b. Penggerak Reformasi Birokrasi

c. Muatan Reformasi birokrasi yang bermutu, terarah dan rasional

d. Proses Reformasi Birokrasi yang berjalan lancar

5. Strategi Terwujudnya Reformasi Birokrasi

Menurut Prof. Eko Prasojo, guru besar sekaligus ahli administrasi negara dari FISIP UI, untuk terwujudnya reformasi birokrasi, maka diperlukan strategi-strategi reformasi birokrasi, yaitu :

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

a. Level kebijakan, harus diciptakan berbagai kebijakan yang mendorong Birokrasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga (kepastian hukum, batas waktu, prosedur, partisipasi, pengaduan, gugatan).

b. Level organisational, dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen berbasis kompetensi, pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap kepentingan masyarakat, penciptaan Standar Kinerja Individu, Standar Kinerja Tim dan Standar Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Level operasional, dilakukan perbaikan melalui peningkatan *service quality* meliputi dimensi *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.

d. Instansi Pemerintah secara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan.

Selain memerlukan strategi-strategi, diperlukan pula tahapan-tahapan reformasi birokrasi, yaitu meningkatkan pelayanan publik guna mendapatkan kembali kepercayaan rakyat, pelayanan publik yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan tingkat kesejahteraan pegawai.

2.1.4. Iklim Investasi

Menurut Bank Dunia (2005), iklim investasi didefinisikan sebagai suatu kumpulan faktor-faktor lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan dorongan bagi badan usaha untuk melakukan investasi

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

secara produktif, menciptakan pekerjaan dan perkembangan kegiatan usaha. Sedangkan menurut Stern (2002:33), iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa depan yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Ada 3 faktor utama dalam iklim investasi mencakup:

1. Kondisi ekonomi makro, termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
2. Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil.
3. Infrastruktur, mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan investasi dan mendorong peningkatan ekspor nonmigas dari berbagai sektor yang potensial. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekspor nonmigas yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

Menurut KPPOD (2008), ada sembilan indikator iklim investasi berdasarkan persepsi pelaku usaha yang mempengaruhi

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

investasi di Indonesia, yaitu akses lahan usaha dan kepastian usaha, perizinan usaha, interaksi antara Pemda dan pelaku usaha, program pengembangan usaha swasta, kapasitas dan integritas Kepala Daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan biaya transaksi lain, kebijakan infrastruktur daerah, keamanan dan penyelesaian konflik, dan kualitas peraturan daerah.

Iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Lebih konkritnya lagi, iklim usaha atau investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin di satu sisi, dan bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin, di sisi lain (Stern, 2002).

Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

mempengaruhi keuntungan netto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak. Menurut laporan Bank Dunia mengenai iklim investasi (World Bank, 2005), diantara faktor-faktor tersebut, stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi merupakan empat faktor terpenting.

Persepsi investor terhadap iklim investasi suatu negara seringkali dipertimbangkan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aliran modal asing masuk ke suatu negara. Persepsi internasional yang direpresentasikan dengan *country risk index* juga dapat menggambarkan bagaimana kemampuan suatu negara dalam memfasilitasi pelaksanaan usaha dari berbagai aspek, seperti: kemudahan dalam melaksanakan usaha, daya saing, kualitas sumber daya manusia, stabililtas politik dan kebebasan. Salah satu penelitian yang secara komprehensif telah mengkaji permasalah ini adalah penelitian yang dilakukan oleh John H. Dunning (2002), yang menyimpulkan 3 faktor yang mempengaruhi arus masuk FDI adalah:

1. *Economic Determinant*, yang meliputi: (a) ukuran pasar; (b) kualitas sumber daya; (c) faktor efisiensi; dan (d) ketersediaan aset.
2. *Policy Framework*, yang meliputi: (a) stabilitas ekonomi, politik dan sosial; (b) aturan yang mendukung masuk dan beroperasinya suatu usaha; (c) standar kesepakatan internasional; (d) kebijakan dalam mengfungsikan dan struktur pasar; (e) persetujuan

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

internasional mengenai FDI; (f) kebijakan privatisasi; (g) kebijakan perdagangan dan perpajakan; dan (i) kebijakan industri.

3. *Business Facilitation*, yang meliputi : (a) insentif; (b) kapital sosial; (c) pelindungan kepemilikan; dan (d) kualitas infrastruktur.

Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Dalam kaitannya tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Hal tersebut terkait pula dengan masalah pemanfaatan tata ruang, gangguan lingkungan dan ketertiban umum. Iklim investasi yang baik tersebut tentu dapat mendorong optimalisasi keuntungan masuknya aliran modal asing bagi negara bersangkutan (Alfaro dan Ozcan, 2006; Kok dan Ersoy, 2009).

Selain itu iklim investasi merupakan suatu proses jangka panjang yang senantiasa berjalan searah dengan perkembangan usaha. Iklim investasi bukan hanya dipertimbangkan pada awal rencana investasi, akan tetapi merupakan variabel strategis yang akan menentukan keberhasilan investasi sepanjang perusahaan berjalan. Iklim investasi yang kondusif akan mendorong produktivitas yang lebih tinggi dengan memberikan kesempatan-kesempatan dan insentif bagi badan-badan usaha untuk berkembang, menyesuaikan diri dan menerapkan cara-cara yang lebih baik dalam menjalankan investasi.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Iklim investasi yang kondusif akan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang mendatangkan keuntungan dalam sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya mekanisme yang berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peningkatan iklim investasi merupakan daya penggerak bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Iklim investasi yang baik adalah iklim investasi yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Iklim investasi kondusif terjadi apabila pemerintah, swasta dan masyarakat umum sama-sama dapat mengambil keuntungan atas keberadaan sebuah investasi.

2.1.5. Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi

1. Pengertian Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi

Di era liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan mega *competition*, investor semakin leluasa dalam berinvestasi, (Sentosa Sembiring, 2007:97). Untuk itu penerima modal harus menyiapkan berbagai sarana dalam menarik investor. Artinya persaingan dalam merebut calon investor semakin terbuka dan penuh kompetisi. Oleh karena itu, sudah tidak dapat lagi hanya mengandalkan adanya keunggulan komparatif semata, akan tetapi harus dapat menciptakan iklim yang kondusif dan sehat sehingga meningkatnya daya saing Indonesia sebagai tujuan penanaman modal.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Minat menurut Salim dan Salim (1996:656) memiliki definisi sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah, keinginan. Perluasan dari definisi minat adalah :

a. Minat dianggap sebagai perantara faktor-faktor mati rasional yang mempunyaidampak pada suatu perilaku.
b. Minat menunjukkan seberapa keras seseorang berani mencoba.
c. Minat menunjukkan seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang.

Sedangkan Penanaman Modal Asing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa. (Pandji Anoraga, 2005:46). Jadi, Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi dapat diartikan suatu niat atau keinginan pihak asing menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa.

Minat investor asing untuk menanamkan dana dalam bentuk FDI menurut Dunning (1977, 1981 dikutip dari Kurniati dkk, 2007, h.18) dapat didasarkan oleh karakteristik utama yaitu *ownership*, *location* dan *internalization advantages*. Pada dasarnya *ownership advantages* adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, yang menjadikan perusahaan tersebut maju atau menonjol pada sektor-sektor tertentu. Keunggulan tersebut yang dimiliki secara internal oleh

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

perusahaan tersebut, dapat dimanfaatkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, biasanya disebut *firm specific asset* yang terdiri dari *tangible assets* seperti barang modal dan mesin, serta intangible assets seperti *knowledge, organizational & entrepreneurial skill, acces to market*, teknologi. Sedangkan *location advantage* merupakan keunggulan yang dimiliki di daerah tersebut dan hanya dapat digunakan di daerah tersebut. Namun pemakaian keunggulan tersebut terbuka untuk semua perusahaan, seperti tenaga kerja yang murah, sumber-sumber alam yang murah, iklim yang menunjang. Sementara *internalization advantages* adalah tindakan untuk menghindar dari adanya *disadvantages* ataupun kapitalisasi sumber-sumber daya alam yang disebabkan sistem harga di pasar dan sistem kebijakan pemerintah.

Menurut Sentosa Sembiring (2007:49) untuk menarik minat investor menanamkan modal diperlukan sejumlah faktor-faktor yang dapat menarik minat investor, yakni:

a. Faktor politik

   Sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha.

b. Faktor ekonomi

   Sebab pengusaha itu butuh ketenangan berusaha, berharap mendapat intensif yang memadai dari pemerintah dimana ia

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

berinvestasi dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan karyawannya, dan dengan mitranya secara baik.

c. Faktor hukum

Sebab berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia.

Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus sebagai negara berkembang mempunyai pola tertentu terhadap konsep hukum dalam kegiatan ekonomi, meliputi konsep pencapaian masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, konsep ekonomi kekeluargaan yang Pancasilais, konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat.

Peranan penanaman modal di Indonesia cukup mendukung perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonomi Indonesia. Untuk mendukung penanaman modal di Indonesia maka perlu pembentukan hukum ekonomi dengan perangkat peraturan membutuhkan kajian yang bersifat komprehensif dan pendekatan secara makro dengan informasi yang akurat demi multidisipliner dari berbagai aspek antara lain:

a. Ekonomi dan sosial;

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

b. Sosiologis dan budaya;

c. Kebutuhan-kebutuhan dasar dan pembangunan;

d. Praktis dan operasional dan kebutuhan ke depan;

e. Moral dan etika bisnis yang berlaku dalam konsep kelayakan dan kepatutan dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan yang beradab. (Restu Octavianus, 2012)

Pembangunan ekonomi haruslah didukung oleh pembangunan hukum karena antara keduanya saling menunjang, dimana pembangunan ekonomi hanya dapat tercapai apabila ada kepastian hukum. Antara hukum dan ekonomi merupakan dua sistem dari sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain, (Dhaniswara K Harjono, 2007:91). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan, salah satu konsep dari globalisasi adalah meletakkan segala kegiatan dan hubungan ekonomi pada peran masyarakat. Berdasarkan konsep ini, maka kesiapan materi hukum harus, di satu pihak diarahkan pada mempersiapkan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi yang utama termasuk hubungan-hubungan ekonomi global. Di pihak lain, mengurangi atau meniadakan aturan-aturan hukum yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara. Pada saat ini, yang terpenting adalah kesiapan aturan hukum yang dapat lebih memberdayakan masyarakat atau pelaku usaha agar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lain, (Bagir Manan, 1998).

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Iklim investasi di Indonesia masih banyak dikeluhkan investor asing. Indonesia dianggap bukan tempat yang kondusif untuk melakukan investasi dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Cina, (Hikmahanto Juwana, 2012). Oleh karena itu, didalam pelaksanaannya pihak investor asing enggan untuk datang dan menanamkan modalnya, karena masih ditemukan kendala-kendala yang sangat kompleks diantaranya permasalahan buruh, ketidakpastian hukum, keamanan, dan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu kendala-kendala yang dihadapi investor asing juga berkaitan dengan beberapa permasalahan prosedural dan birokrasi misalnya dalam mengurus perizinan investasi baru, banyaknya pungutan liar dan lain-lain.

Tantangan lainnya yang dihadapi calon investor asing di Indonesia adalah bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memberikan iklim yang kondusif untuk terselenggaranya investasi. Pada tingkatan pemerintah pusat, masalah yang dihadapi adalah masih belum terlihatnya yang jelas dalam strategi pengembangan industrilialisasi. Strategi yang demikian sangat diperlukan sehingga birokrasi pada pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat menyatukan dan melakukan koordinasi atas rancangan-rancangan pengembangan investasinya di daerah untuk dapat mendukung tercapainya target-target dari strategi industrilisasi nasional tersebut.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Investor asing akan menanamkan modal di Indonesia apabila adanya perangkat hukum yang jelas. Artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan investasi tidak saling berbenturan. Perlunya mempersiapkan peta penanaman modal yang memuat peluang apa saja yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor, ketentuan investasi yang komprehensif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi para calon investor jika ia ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan adanya kepastian hukum, (Sentosa Sembiring, 2007:103).

Guna mengundang penanaman modal khususnya investor asing ke Indonesia selain diperlukan adanya pengaturan pemerintah yang konsisten dan terpadu agar dapat memberikan keuntungan bukan hanya kepada investor asing saja tetapi juga kepada pemerintah Indonesia khususnya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya yang kian tahun dirasakan sudah cukup stabil. Kebijakan penanaman modal yang mengandung pembatasan-pembatasan ketat dan merupakan praktis harus diganti oleh kebijakan penanaman modal yang lebih terbuka. Peningkatan penanaman modal harus tetap di dalam koridor yang telah digariskan dalam pembangunan nasional yang telah direncanakan.

Investor akan mempertimbangkan kemana modalnya akan diinvestasikan dengan beberapa pertimbangan bahwa calon *host country* hendaknya dapat memberikan jaminan atas kepastian dan

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

perlindungan hukum, adanya birokrasi yang sederhana dan konsisten, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sebaliknya *host country* pun menginginkan agar dapat dihindari konsentrasi pasar yang meningkat, repatriasi keuntungan yang berlebihan, adanya transfer pricing, transfer teknologi yang tidak layak, serta ketergantungan yang tidak diinginkan kepada negara asing, (Budhivaja, 2012).

Penanaman modal asing (PMA) dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu :

1. Fundamental ekonomi yang kuat sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor.
2. Sedangkan berdasarkan hasil riset dari KPPOD pada tahun 2003 PMA dipengaruhi oleh beberapa faktor non ekonomi yaitu :
   a. Faktor stabilitas politik dan keamanan suatu negara yang paling dipertimbangkan oleh investor asing.
   b. Faktor kelembagaan.
   c. Sosial politik, ekonomi daerah.
   d. Tenaga kerja dan produktivitas
   e. Infrastruktur fisik merupakan indikator yang berpengaruh terhadap daya tarik investasi daerah-daerah di Indonesia.

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu:

1. Investasi Portofolio

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru. Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha baru, hal ini berarti pula membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar hutang bank. Selain itu, dalam proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen.

2. Investasi Langsung

Investasi langsung atau disebut juga dengan penanaman modal asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Menurut Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer (2008:60), pada dasarnya Investasi langsung seringdiartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan:

a) Pengalihan dana (*transfer of funds*);
b) Proyek yang memiliki jangka waktu panjang (*long-termproject*);
c) Tujuan memperoleh pendapatan regular (*the purpose of regular income*);

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

d) Partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (*the participation of the person transferring the funds*); dan

e) Suatu resiko usaha (*business risk*).

Penanaman modal asing (PMA) atau *Foreign direct investment* (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan, dimana selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.

2. Kontrak Penanaman Modal Asing

Sebagaimana diketahui, penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan :

a. Oleh pihak asing (perorangan atau badan hukum), ke dalam suatu perusahaan yang seratus persen diusahakan oleh pihak asing.

b. Dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional.

3. Fungsi Penanaman Modal Asing bagi Indonesia

a. Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

b. Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi.

c. Membantu dalam proses industrilialisasi yang sedang dilaksanakan.

d. Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran.

e. Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

f. Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya.

g. Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal.

4. Teori Penanaman Modal Asing

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing (PMA), yaitu :

a. Teori R. Vernon

Vernon (2006:33) menjelaskan penanaman modal asing dengan model yang disebut Model Siklus Produk (Pandji Anoraga, 2005:53). Dalam model ini, introduksi dan pengembangan produk baru di pasar mengikuti tiga tahap. Pendorong untuk mengembangkan produk baru diberikan oleh kebutuhan dan peluang pasar.

Dalam tahap satu, pada waktu produk pertama kali dikembangkan dan dipasarkan, diperlukan suatu hubungan yang erat antara kelompok desain, produksi dan pemasaran dari perusahaan dan pasar yang akan dilayani oleh produk itu. Untuk itu produksi dan penjualan perlu dilakukan di dalam negeri.

Tahap kedua yakni perusahaan mulai memikirkan kemungkinan mencari pasar-pasar baru di negara-negara yang relatif maju dan ekspor pun mulai dilakukan dengan tujuan negara

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

dunia ketiga. Keuntungan perusahaan terletak pada skala ekonomi dalam produksi, pengangkutan dan pemasaran. Strategi-strategi penentuan harga dan lokasi didasarkan atas aksi dan reaksi *multinational corporation* yang lain dan bukan pada biaya komperatif.

Tahap ketiga atau tahap terakhir yakni dimana produk telah terbuat dengan baik dengan desain yang distandarisasi, sehingga riset dan keterampilan manajemen tidak lagi penting. Tenaga kerja yang tidak terampil dan setengah terampil mulai mendapat tempat dan konsekuensinya, produk bergerak ke negara-negara yang sedang berkembang, dimana ongkos tenaga kerjanya masih lebih rendah.

b. Teori J.H Dunning

John Dunning menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing melalui teori ancangan eklektis (Pandji Anoraga, 2005:57). Teori eklektis menetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang diperlukan bila sebuah perusahaan akan berkecimpung dalam penanaman modal asing.

Yang pertama adalah adanya keunggulan spesifik perusahaan. Rentang keunggulan yang dapat menumbuhkan FDI adalah :

1) Teknologi pemilikan disebabkan karena kegiatan penelitian dan pengembangan.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

2) Keterampilan manajerial, pemasaran, atau lainnya yang spesifik untuk fungsi organisasi perusahaan.
3) Deferensiasi produk, merk dagang atau nama cap.
4) Ukuran besar, yang mencerminkan skala ekonomi.
5) Keperluan modal yang besar untuk pabrik dengan ukuran efisien minimum.

Yang kedua adalah keunggulan internalisasi. Kondisi yang menyokong internalisasi meliputi :

1) Biaya tinggi dalam membuat dan melaksanakan kontrak.
2) Ketidakpastian pembeli tentang nilai teknologi yang dijual.
3) Kebutuhan untuk mengendalikan penggunaan atau penjualan kembali produk.
4) Keunggulan untuk menggunakan diskriminasi harga atau subsidi ulang (*cross-subsidization*).

Yang ketiga adalah keunggulan spesifik negara. Keunggulan spesifik lokasi dari negara tuan rumah dapat meliputi :

1) Sumber daya alami.
2) Kekuatan tenaga kerja biaya rendah yang efisien dan terampil.
3) Rintangan perdagangan membatasi impor.

Yang pertama dan kedua dapat menghasilkan FDI yang mengarahkan ke ekspor maupun produksi untuk pasar lokal. Yang ketiga hanya akan berkaitan dengan produksi lokal saja.

c. Teori David K. Eiteman

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Menurut David K. Eiteman (2009:3), motif yang mendasari penanaman modal asing ada tiga, yaitu : motif strategis, motif perilaku dan motif ekonomi (Pandji Anoraga, 2005:60).

Dalam motif strategis dibedakan dalam :

1) Mencari pasar
2) Mencari bahan baku
3) Mencari efisiensi produksi
4) Mencari pengetahuan
5) Mencari keamanan politik.

Sedangkan motif perilaku merupakan ransangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok.

Motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

d. Teori Robock & Simmonds

Teori PMA yang lain dijelaskan oleh Robock & Simmonds (2009:78), melalui pendekatan global, pendekatan pasar yang tidak sempurna, pendekatan internalisasi, model siklus produk, produksi internasional dan model imperalisasi marxis (Pandji Anoraga, 2005:61).

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Model Siklus Produk. Model ini menerangkan bahwa penanaman modal asing melalui tiga tahap, yaitu tahap produk baru, tahap produk matang dan tahap produk yang distandarisasi.

1) Pada tahap produk baru, produk dihasilkan di dalam negeri. Sedangkan untuk pasar luar negeri dilayani dengan ekspor.
2) Pada tahap produk matang, harga produk menjadi penting. Pasar luar negeri telah dilayani oleh produksi lokal.
3) Pada tahap ketiga, persaingan menjadi lebih penting dan produksi diarahkan pada lokasi/tempat yang biayanya rendah (kecil) dalam lingkup negara yang berpenghasilan rendah.

e. Teori Stephen Hymer

Menurut Hymer, investasi langsung termasuk dalam teori persaingan tidak sempurna, dan bukan dalam teori persaingan biasa atau teori mengenai pergerakan modal secara internasional (Pandji Anoraga, 2005:66)

5. Kebijakan Pemerintah tentang Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia

Kebijakan pemerintah tentang penanaman modal asing mengacu kepada UU No.25 Tahun 2007, pasal 3 ayat 1 huruf i yang menjelaskan tentang azas kemandirian dimana menetapkan azas penanaman modal yang dilakukan adalah dengan tetap mengemukakan

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Pengertian Penanaman Modal Asing menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara RI yang dilakukan sepenuhnya atau oleh penanaman modal asing maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri. Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan PMA harus berlokasi di wilayah RI dan sumber modalnya bisa seluruhnya atau seratus persen modal asing dan terdapat modal dalam negeri dengan besarannya tergantung dengan kebutuhan serta kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No.36 Tahun 2010 tentang bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

6. Keuntungan dengan Adanya Penanaman Modal Asing

Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya penanaman modal asing antara lain (G. Kartasappoetra dkk, 2005:91) :

a. Produksi-produksi beberapa produk kebutuhan rakyat banyak dan maksud untuk di ekspor (dengan penggunaan bahan baku yang umumnya terdapat di Indonesia) akan jauh meningkat baik kuantitas maupun kualitas.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

b. Jika produksi mengalami kegagalan, seluruh risiko ditanggung penanam dalam *direct investment* dan sebagian besar ditanggung penanam dalam *joint enterprise* atau *joint venture*.

c. Para pekerja Indonesia memperoleh kesempatan kerja dan dapat membiasakan diri dengan pekerjaan-pekerjaan mutakhir (alih teknologi).

d. Bila perjanjian kontrak telah habis, mau tidak mau segala peralatan akan menjadi milik perusahaan Indonesia, sehingga perusahaan yang sejenis akan berlangsung terus dengan pengolahan dan pendayagunaannya seratus persen Indonesia.

e. Atau, para pekerja tersebut memperoleh cukup pengalaman serta keterampilan untuk membangun perusahaan nasional, yang sejenis yang mungkin lebih baik dan lebih terarah bagi peningkatan pembangunan di daerah-daerah lainnya, dengan demikian mereka dapat menjadi pionir pelaksanaan proyek-proyek mutakhir di daerah-daerah yang ada di Indonesia atau memutakhirkan perusahaan-perusahaan nasional yang telah ada di daerah-daerah.

f. Devisa Indonesia akan meningkat jumlahnya, pendapatan penduduk per kapita akan meningkat dan produk-produk kebutuhan rakyat banyak akan mudah diperoleh di pasaran dengan mutunya yang lebih meningkat.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga pernah di angkat sebagai topik penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Maka peneliti juga diharuskan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

1. Kokoh Prio Utomo (2010) dengan judul "Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Pelayanan Publik Dan Reformasi Birokrasi Terhadap Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif Di Kabupaten Bekasi" Metodologi analisa data menggunakan uji regresi berganda dengan variabel desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi sebagai variabel independen dan variabel iklim investasi sebagai variabel dependen. Hasil dan pembahasan analisis data menunjukkan bahwa variabel desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi secara bersama-sama maupun secara individu masing-masing berpengaruh terhadap penciptaan iklim investasi kondusif. Variabel reformasi birokrasi dan variabel pelayanan publik sangat berpengaruh karena indikator variabel reformasi birokrasi yaitu pemerintah daerah Kab. Bekasi sangat mampu dalam menjalin sinergi (*networking*) dengan pemerintah daerah lain dan juga pemerintah pusat untuk mengupayakan orientasi pelayanan yang tepat terhadap masyarakat. Sedangkan variabel pelayanan publik dikarenakan indikator prosedur pelayanan publik Pemda Kab. Bekasi sangat mudah dipahami oleh pelaksana maupun penerima pelayanan publik. Dari ke 3 (tiga)

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

variabel diatas yang sangat berpengaruh adalah variabel reformasi birokrasi dan variabel pelayanan publik, hal ini karena nilai koefisien beta pada tabel koefisien regresi bahwa variabel reformasi birokrasi memiliki nilai standardized koefisien beta tertinggi (0,483) kemudian diikuti oleh variabel pelayanan publik (0,309). Variabel reformasi birokrasi sangat berpengaruh pada penciptaan iklim investasi kondusif dikarenakan indikator pemerintah daerah Kab. Bekasi sangat mampu dalam menjalin sinergi (*networking*) dengan pemerintah daerah lain dan juga pemerintah pusat untuk mengupayakan orientasi pelayanan yang tepat terhadap masyarakat. Variabel pelayanan publik dikarenakan indikator prosedur pelayanan publik Pemda Kab. Bekasi sangat mudah dipahami oleh pelaksana maupun penerima pelayanan publik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Herzifa Larht (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Stabilitas Sosial Politik Terhadap Minat Perusahaan Modal Asing Di Daerah Istimewa Yogyakarta" menyatakan bahwa Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Stabilitas sosial politik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Minat perusahaan modal asing Di Daerah Istimewa Yogyakarta Medan. Dan sumbangan variabel Stabilitas sosial politik terhadap variabel Minat perusahaan modal asing adalah sebesar 54,8% dan sisanya sebesar 45,2% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu tujuan dan kemampuan, teladan

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

pimpinan, balas jasa, keadilan, sanksi hukum, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sarwedi (2002) yang berjudul "Investasi Asing Langsung Di Indonesia Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan karakteristik dalam negeri suatu negara, yang akan dikombinasikan dalam periode jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan perhitungan kuadrat terkecil sederhana (ordinary least square = OLS). Dengan mengaplikasikan model koreksi kesalahan (error correction model = ECM) dan Uji Kausalitas Granger, akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* FDI) di Indonesia selama periode 1978-2001. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel ekonomi (GDP, Growth, Wage, dan Ekspor) mempunyai hubungan positif dengan FDI, sedangkan variabel non ekonomi yaitu stabilitas politik (SP) mempunyai hubungan negatif. Hal ini sejalan dengan hasil temuan empiris Schneider and Frey (1986) bahwa kestabilan politik mempunyai hubungan negatif dengan FDI.

2.3. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pengaruh antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Gambar 2.4

KERANGKA PEMIKIRAN

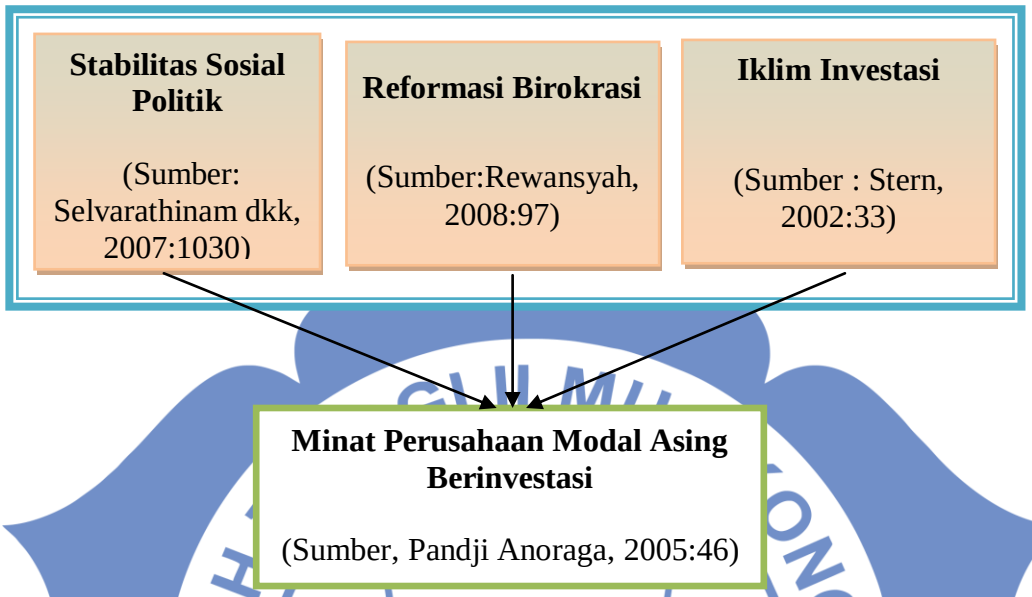

Alur	Sumber
Stabilitas Sosial Politik →Minat Perusahaan ModalAsing Berinvestasi	(Dash dan Raja, 2009;Kuncoro, 2000; Sartono, 2001)
Reformasi Birokrasi →Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi	(Lambsdorff, 2002; Akhmaddhian, 2012)
Iklim Investasi→Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi	(Kurniati dkk, 2007; Sembiring, 2007;Alfaro dan Ozcan, 2006; Kok dan Ersoy, 2009)

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan stabilitas sosial politik terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

2. Terdapat pengaruh yang signifikan reformasi birokrasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan iklim investasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi dan iklim investasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini selama 6 (enam) bulan sebagaimana dijabarkan pada tabel 3.1 di bawah ini

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian Penyusunan Tesis

No	Kegiatan Penelitian	Waktu																							
		Okt 2014				Nov 2014				Des 2014				Jan 2015				Feb 2015				Mar 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Studi Pendahuluan	√	√																						
2.	Seminar Proposal			√	√																				
3.	Revisi Proposal				√	√																			
4.	Penyusunan Instrumen						√	√	√	√															
5.	Penyebaran Instrumen									√	√	√													
6.	Pengumpulan Data											√	√	√	√										
7.	Analisis Data															√	√	√	√						
8.	Penulisan Tesis																			√	√	√			
9.	Sidang Tesis																						√		
10.	Revisi Tesis																						√	√	
11.	Penggandaan tesis																								√

3.2. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research* tipe kausal yang berupaya menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lingkup penelitian ini adalah

menguji pengaruh stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi, dan iklim investasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia.

Terdapat 4 variabel penelitian yaitu, 3 variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang pertama yaitu stabilitas sosial politik dengan simbol X_1, variabel independen kedua yaitu reformasi birokrasi dengan simbol X_2, dan variabel independen ketiga yaitu iklim investasi dengan simbol X_3. Satu variabel dependen yaitu minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia dengan simbol Y. Kerangka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Disain Penelitian

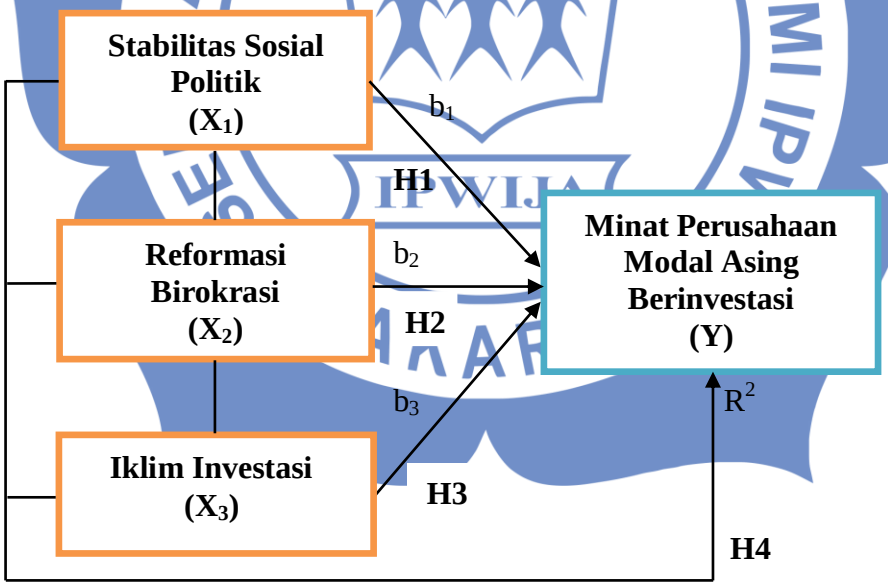

Sumber: diolah penulis

Keterangan:

X_1 = Variabel bebas (stabilitas sosial politik)

X_2 = Variabel bebas (reformasi birokrasi)

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

X_3 = Variabel bebas (iklim investasi)

Y = Variabel terikat (minat perusahaan modal asing berinvestasi)

b1 = Koefesien regresi variabel stabilitas sosial politik

b2 = Koefesien regresi reformasi birokrasi

b3 = Koefesien regresi iklim investasi

R^2 = Koefesien determinasi variabel stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi dan iklim investasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi

3.3. Operasionalisasi Variabel

Table 3.2

Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Definisi Konseptual	Indikator	Item Kuesioner
Stabilitas Sosial Politik (X_1) Sumber : Selvarathinam, dkk(2007:1030)	Stabilitas sosial politik didefinisikan sebagai lingkungan kondusif dari suatu negara baik secara sosial, ekonomi, dan politik.	1. Keamanan	1, 2, 3, 4
		2. Sosial Politik	5, 6, 7, 8
		3. Budaya masyarakat	9,10, 11 ,12
Reformasi Birokrasi (X_2) Sumber : Rewansyah (2010;149)	Kebijakan reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya pembentukan profil birokrasi yang efisien, mampu, tanggap dan dinamis terhadap tuntutan yang ditujukan kepada birokrasi itu sendiri, baik berasal dari lingkup nasional, regional dan internasional yang berjalan kearah *good governance*.	1. Birokrasi yang bersih	1, 2, 3
		2. Birokrasi yang efisien dan efektif	4, 5
		3. Birokrasi yang transparan	6, 7
		4. Birokrasi yang melayani	8, 9
		5. Birokrasi yang terdesentralisasi	10, 11, 12

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Iklim Investasi (X_2) Sumber : Stern (2002:33)	Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa depan yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi	1. Kondisi ekonomi makro	1, 2, 3, 4
		2. Kepemerintahan dan kelembagaan	5, 6, 7, 8
		3. Infrastruktur	9,10, 11 ,12
Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi (Y) Sumber : -Pandji Anoraga (2005:46) -Salim &Salim (1996:656)	Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi dapat diartikan suatu niat atau keinginan pihak asing menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa.	1. Keinginan menanamkan modal	1, 2, 3, 4
		2. Mendapatkan laba	5, 6, 7, 8
		3. Penciptaan produksi	9,10, 11 ,12

3.4. Populasi, Sampel dan Metode Sampling

3.4.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:115) yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Sedangkan menurut Malhotra (2009:364) populasi adalah gabungan seluruh elemen, yang memiliki serangkaian karakteristik serupa, yang mencangkup semesta untuk kepentingan masalah riset/penelitian.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Sehingga yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang top manajemen, terdapat 25 Perusahaan dalam setiap perusahaan diambil 2orang top manajemen.

Tabel 3.3

Jumlah Populasi

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1	PT Megatop Inti Selaras	Pertambangan Pasir Besi
2	PT Megakarya Anugerah Nusantara	Pertambangan Pasir Besi
3	PT UMR Indonesia	Jasa kontraktor Pertambangan
4	PT Fuhai Industrial Estate	Pengelolaan Kawasan Industri
5	PT Fuhai Steel Indonesia	Pabrik Baja
6	PT Karya Cahaya Sejati	Investasi
7	PT Rakuten Belanja Online	*e-commerce*
8	PT China Telecom Indonesia	Layanan komunikasi dan informasi
9	The Export-Import Bank of China	Layanan perbankan
10	Ansteel Group	Industri Baja
11	PT G4S Security Service	Layanan Jasa Sekuriti
12	PT Thriveni	Pertambangan Batubara
13	PT Sumber Suryadaya Prima	Pertambangan Pasir Besi
14	PT Petro China International Jabung Ltd	Migas
15	PT Karya Bumi Baratama	Pertambangan Batubara
16	PT Ocean Port Mining Indonesia	*Mining service*
17	PT Armada Rock Karunia Transshipment	Layanan perkapalan pengangkutan hasil tambang
18	PT Carsurin	Surveyor pertambangan
19	PT CCIC Jakarta	*Mining support services for laboratory analysis of Mineral and Coal*
20	PT Outotec Technology Solutions	*Mining Service*
21	PT Prudential Life Assurance	Asuransi Jiwa
22	PT Indo Tambangraya Megah tbk	Pertambangan batu bara
23	PT International Nickel Indonesia tbk	Pertambangan Nikel
24	PT Freeport Indonesia	Pertambangan emas dan tembaga
25	PT Newmont Nusa Tenggara	Pertambangan emas dan tembaga

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

3.4.2. Sampel

Sampel menurut Widayat dan Amirullah (2005:52) adalah suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih dalam penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang top manajemen.

3.4.3. Metode Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara keseluruhan (sampel jenuh) dari jumlah populasi (*total sampling*) yaitu 50 orang top manajemen

3.5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Banister (dalam Poerwandari, 2007:80) menyatakan bahwa observasi menjadi metode paling dasar dan paling tua dari ilmu-ilmu sosial, karena dalam cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang penulis butuhkan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi dan iklim investasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia.

2. Kuesioner

Kuesioner menurut Fathoni (2006:111), adalah teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan atau isian) untuk diisi langsung oleh responden. Ada beberapa jenis angket atau kuesioner yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Kriyantono (2006:94) menyebutkan angket terbuka adalah apabila pertanyaan diformulasi sedemikian rupa sehingga responden mempunyai kebebasan untuk menjawab tanpa adanya *alternative* jawaban yang diberikan periset. Sedangkan angket tertutup adalah suatu angket dimana responden telah memberikan *alternative* jawaban oleh periset. Responden hanya memilih jawaban yang menurutnya sesuai dengan realitas yang dialaminya, biasanya dengan memberikan tanda (X) atau tanda (√).

Pada penelitian ini penulis menggunakan angket atau kuesioner tertutup (pernyataan yang sudah tersedia), dimana penulis menyediakan pilihan dari setiap pernyataan yang diajukan kepada responden, sehingga responden hanya tinggal memberi tanda (X) atau tanda (√) pada setiap pilihan pernyataan yang dikehendakinya. Untuk pernyataan tertutup ini, dengan pengukuran skala likert secara umum menggunakan peringkat 5

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

(lima) angka penilaian yaitu mulai dengan skala 1 sampai 5. Berikut adalah penjabarannya :

Tabel 3.4

Skala Likert yang Digunakan

Pertanyaan	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Cukup Setuju (CS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Sumber: Sugiyono (2005:216)	

3.6. Instrumen Variabel

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kuantitatif, yaitu teknik analisis data dengan dengan menggunakan rumus-rumus statistik melalui program statistik SPSS 16.00 yaitu:

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas menguji seberapa baik suatu instrument dalam mengukur konsep tertentu yang ingin diukur, (Uma Sekaran, 2006:39). Uji Validitas ini dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total memakai rumus teknik korelasi *product moment*.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah sebagai berikut:

a. Apabila nilai r_{hasil} positif serta $r_{hasil} > r_{tabel}$, maka butir atau variabel tersebut valid.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

b. Apabila nilai r_{hasil} negatif dan $r_{hasil} < r_{tabel}$ atau pun r_{hasil} negatif > r_{tabel} maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan (r_{xy}) lebih besar daripada nilai r_{tabel} dengan taraf signifikan 5%.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas adalah alat uji untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2007:87). Apabila suatu alat ukur memberikan hasil yang stabil, maka disebut alat ukur itu handal. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Imam Ghozali, 2005:41).

Pengujian reliabilitas banyak metodenya di antaranya yaitu dengan menggunakan metode Koefisien Alpha (ά) (Cronbach dalam Saifuddin Azwar, 2005:75). Dari analisis ini skor-skor dikelompokkan menjadi belahan dua dari jumlah kuesioner yang ada dan dimasukkan ke Reliability Analysis. Suatu butir pertanyaan apabila dikatakan reliabel apabila nilai yang diperoleh sama atau lebih besar dari 0,600 yang berarti bahwa 40% skor tes tersebut hanya menampakkan variasi.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

3.7. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer, yaitu SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 16.

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan. Terdapat 4 (empat) pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar *variabel independen*. Multikolinieritas merupakan keadaan dimana satu atau lebih *variabel independen* dinyatakan kondisi linier dengan variabel lainnya. Artinya jika diantara pengubah-pengubah bebas yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi satu dengan yang lain maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Ghozali (2006:95) menyatakan bahwa ada beberapa cara mendeteksi multikolineritas, akan tetapi pada penelitian ini akan dilakukan uji multikolineritas dengan melihat nilai *Tolerance* dan lawannya VIF (*Variance Inflation Factor*) pada model regresi. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh *variabel independen* lainnya.Dalam

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

pengertian sederhana setiap *variabel independen* menjadi *variabel dependen* dan diregresi terhadap *variabel independen* lainnya. Jadi *tolerance* yang rendah sama dengan niali VIF tinggi (karena VIF = 1/*Tolerance*). Pada umumnya nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0,10 atau sama dengan nilai jika VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir.

2) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Model yang baik adalah Homoskedastisitas dan tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Menurut Ghozali (2006:125-126) ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas, akan tetapi pada penelitian ini dilakukan uji Heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukakn dengan melihat ada tidaknya

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPREAD dimana sumbu X dan Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di*studentized*.

Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu yang teratur seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

3) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat data variabel X dan variabel Y pada persamaan regresi yang akan dihasilkan apakah berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian normalitas ini, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a) Cara statistik melalui nilai kemiringan kurva skewness atau keruncingan kurva kurtosis.

b) Cara grafik histogram dan *Normal Probability Plots.*

4) Uji Autokolerasi

Uji ini untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

adanya autokorelasi dalam *Durbin Watson* (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW<-2).

b) Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau 2≤DW≤+2.

c) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2 atau DW>+2.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Sugiyono (2008:277) mengemukakan analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan prediksi, bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan atau diturunkan nilainya. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1, dan X_2), cara ini digunakan untuk mengetahui kuatnya pengaruh antara beberapa variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2008:277) merumuskan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3}$$

Keterangan:

Y = Minat Perusahaan Modal Asing Berinvestasi di Indonesia

X_1 = Stabilitas Sosial Politik

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

X_2 = Reformasi Birokrasi

X_3 = Iklim Investasi

b_1 = Koefisien regresi dari Stabilitas Sosial Politik

b_2 = Koefisien regresi dari Reformasi Birokrasi

b_3 = Koefisien regresi dari Iklim Investasi

c. Koefisien Determinasi

Mudrajad Kuncoro (2009:100), menurutnya Koefsien pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol (0) dan satu (1). Nilai r^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas.

Besarnya pengaruh variabel "X_1" dan "X_2" terhadap variabel "Y" dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd, yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya yang dinyatakan dalam persentase yaitu:

$$K_d = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Nilai koefisien determinasi

r = Nilai koefisien korelasi

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

2. Pengujian Hipotesis

Uji t dan uji F digunakan untuk menguji hipotesis, teknik pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan bantuan komputer program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) Versi 16 *for Windows*. Statistik uji yang digunakan sebagai berikut:

a. Uji t

Menurut Sugiyono (2005:223) uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat. Adapun rumus uji t sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Statistik uji korelasi (t_{hitung})

r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya sampel

r^2 = Koefisien determinasi

Adapun pengujian yang dilakukan dengan ketentuan sesuai kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan menurut Sugiyono (2011:97) adalah:

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

1) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Uji F

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus uji F menurut Sugiyono (2005:190) adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

F = Nilai F (F_{hitung})

R^2 = Koefisien korelasi berganda

K = Jumlah variabel bebas

n = Ukuran sampel

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima.

2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah diuraikan tentang pengaruh stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi dan iklim investasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi, maka dari hasil analisis dan pembahasan pada bagian terdahulu, penulis akan mengambil suatu kesimpulan dari hasil pembahasan tesis ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan stabilitas sosial politik terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia, dimana nilai koefisien regresi b_1 = 0,368 dan nilai sig (0,00). Ini dapat diartikan bahwa jika nilai stabilitas sosial politik meningkat sebesar satu maka nilai minat perusahaan modal asing berinvestasi juga akan meningkat sebesar 0.368.
2. Terdapat positif dan signifikan pengaruh reformasi birokrasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia, dimana nilai koefisien regresi b_2=0.650 dan nilai sig (0,000). Ini dapat diartikan bahwa jika nilai reformasi birokrasi meningkat sebesar satu maka nilai minat perusahaan modal asing berinvestasi juga akan meningkat sebesar 0.650.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan iklim investasi terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia, dimana nilai koefisien regresi b_3=0.409 dan nilai sig (0,002). Ini dapat diartikan bahwa jika nilai

iklim investasi meningkat sebesar satu maka nilai minat perusahaan modal asing berinvestasi juga akan meningkat sebesar 0.409.

4. Terdapat pengaruh yang signifikan stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi dan iklim investasi secara simultan terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia, dengan nilai sig (0,000). Besarnya nilai R Square (R^2) sebesar 0.760, yang menunjukkan bahwa sebesar 76% variabel stabilitas sosial politik, reformasi birokrasi dan iklim investasi secara simultan berpengaruh terhadap minat perusahaan modal asing berinvestasi di Indonesia, sedangkan sisanya sebesar 24% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2. Saran

Pada bab penutup, penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi investor di Indonesia. Adapun saran-saran adalah sebagai berikut:

1. Indonesia perlu mendorong investor dalam iklim persaingan yang sehat, menunjang usaha peningkatan efisiensi produksi, mengembangkan ekspor, meningkatkan dan memeratakan investasi serta memantapkan stabilitas ekonomi.
2. Diperlukan usaha untuk meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terutama pada dimensi yang berhubungan dengan SDM yaitu salah satunya pegawai yang bersifat adaptif, responsif,

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

proaktif. Artinya pegawai harus mampu beradaptasi, memberikan tanggapan yang baik.

3. Mengingat Daftar Negara Investasi mempunyai sifat strategis yaitu untuk melindungi kepentingan nasional dalam kerangka penciptaan iklim investasi yang sehat serta mempertimbangkan masalahnya yang bersifat lintas sektor, penyusunan Daftar Negara Investasi sangat perlu dilakukan oleh kepala bagian investasi dalam setiap perusahaan.
4. Untuk meningkatkan minat perusahaan modal asing untuk berinvestasi di Indonesia, Pemerintah perlu meningkatkan daya tarik investasi nasional melalui perbaikan iklim investasi, menjaga kestabilan sosial politik, serta melanjutkan proses reformasi birokrasi dan deregulasi ketentuan dan persyaratan penanaman modal yang dapat mengurangi minat investor.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. (2005). *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

_____. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Cetakan ketujuh)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

_____. (2009). *Manajeman Sumber Daya Manusia*. Bandung : Perusahaan Rosda.

Akhmaddhian, Suwari. (2012). *Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No.13 September 2012.

Aldridge, John. E Siswanto Sutojo. (2008). *Good Corporate Governance*. Jakarta : PT. Damar Mulia Pustaka.

Alfaro, Laura dan Sebnem Kalemli Ozcan. (2006). *Capital Flow in a Globalized World: The Role of Policies and Institutions*.

Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : GrahaIlmu.

Anoraga, Pandji. (2005). *Manajemen Bisnis (Cetakan Ketiga)*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ariani, D. Wahyu. (2009). *Manajemen Operasi Jasa*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Azwar, Saifuddin. (2005). *Reliabilitas & Validitas (Cetakan kelima)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. (Juli 2014). *Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan II dan Januari-Juni Tahun 2014*.http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/public/Press%20Release%20TW%20II%202014%20-%20ind-FINAL%2024juli2014.pdf. 24 Juli 2014

Bagir Manan. (1998). *Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Globalisasi*. Makalah dalam Seminar Tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Globalisasi, Penyelenggara FH Unpad Bandung, 30 April 1998.

Baswir.(2009). *Agenda Ekonomi Kerakyatan*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Baumeister, R. F. & Bushman, B. J. (2011). *Social Psychology And Human Nature* (2nd edition). Wadsworth : Cengage Learning.

Budhivaja. (2012). *3 (tiga) Sisi Pandang Kegiatan Investasi Antara Negara Majudan Negara Berkembang*, http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2012/02/HKINVEST-2012-Capter-III.pdf,, diakses terakhir tanggal 7 Maret 2012.

Budiardjo, Miriam.(2001). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Tama.

Dash, Bhartee Bhusana dan Angara Raja. (2009). *Institutions and The Quality of Governance : An Empirical Study of International Differences in Economic Development in India*. Asia Pacific Development Journal Vol. 16 No.1

Dhaniswara K Harjono. (2007). *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 25Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Dunning, J. H. B. Kogut dan M.Blomstorm. (1977,1981). *Globalization of firms and the competitiveness of nations*. Lund, Institute of Economic Research Lund University : Bromley : Chartwell-Bratt. Dikutip dari: Yati Kurniati,Andry Prasmuko, dan Yanfitri. (2007). *Determinan FDI (faktor-faktor yang menentukan investasi langsung)*. Working Paper, WP/06/2007, Agustus 2007. Bank Indonesia.

Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_____. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Glueck, W. F. & Jauch L. R. (2001). *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, Terjemahan oleh Murad, Econ dan Henry Sitanggang. Jakarta : Erlangga.

Gregory G. Dess, G.T. Lumpkin, Marilyn L. Taylor. (2005). *Strategic Management 2e : Creating Competitive Advantages*. McGraw-Hill.

Fathoni, Abdurrahmat . (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Rineka Cipta

Hariyoso, S. (2002). *Pembaharuan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Peradaban.

Harvey, Donald F. (1982). *Business Policy and Strategic Management*. Ohio : Charles E. Merrill Publishing Co.

Hasibuan, Malayu S.P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi). Jakarta : Bumi Aksara.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

_____. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

_____. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Heidjrachman dan Suad Husnan. (2007). *Manajemen Personalia* (Edisi 4, Cetakan Kesembilan). Yogyakarta : BPFE.

Hutabarat, Jemsly & Martani Huseini. (2006). *Operasionalisasi Strategi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Jack C. Plano. (1989). *Kamus Analisa Politik*. Jakarta : CV. Rajawali

Jun K W, Singh H. (1996). *The Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries*. Transnational Corporations, 5 (2) : 67-105.

Kartasapoetra G, dkk. (2005). *Manajemen Penanaman Modal Asing*. Jakarta : Bina Aksara.

Kok, Recep dan Bernur Acikgoz Ersoy. (2009). *Analysis of FDI Determinants in Developing Countries*. International Journal of Social Economics Vol.36 No 1-2.

Kriyantono, Rachmat. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana.

Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

_____. (2000). *Manajemen Keuangan Internasional*. Yogyakarta : BPFEUGM

Lambsdorff, Johann Graf. (2002). *How Corruption Affects Persistent Capital Flows*. Economics of Governance. Springer Verlag University of Passau.

Manullang. (2008). *Dasar-DasarManajemen*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.

Martoyo, Susilo. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi 5, Cetakan Pertama). Yogyakarta : BPFE.

Mas'oed, Mohtar. (2007). *Memahami Investasi Langsung Luar Negeri, Handout kuliah Investasi dan Perdagangan*. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana FISIPOL HI UGM.

Mulyadi. (2001). *Balanced Scorecard : Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan*, Jakarta : Salemba Empat.

Mulyadi dan Johny Setiawan. (2001). *System Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta : PT Salemba Emban Patria.

Munandar, Ashar Sunyoto. (2005). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta : UI

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Mutiara, S. Panggabean. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor : Ghalia Indonesia.

_____. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Pearce, John A.II & Richard B Robinson.(1997). *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Terj. Agus Maulana. Jakarta : Binarupa Aksara.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Rewansyah, Asnawi. (2008). *Reformasi Birokrasi Ceramah Ketua LAN RI*, pada Diklat Pim Tk II Angkatan XXXIII Kelas D. Jakarta, 2008.

_____. (2010). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta : Yusaintanas Prima.

RestuOctavianus. (2012). *Penanaman Modal Asing dalam Rangka Investasi di Indonesia*, http://restuoctavianus.blogspot.com/2011/03/penanaman-modal-asing-dalam-rangka. html, diakses terakhir tanggal 30 Maret 2012.

Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer. (2008). *Principles of International Investment Law*. 1st Ed., New York : Oxford University Press.

Salim, Peter, Yeny Salim. (1996). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi I, Modern English Press, Jakarta.

Sartono, R. Agus. (2001). Manajemen Keuangan Internasional.Yogyakarta : BPFE UGM.

Sarundajang, S.H. (2003). *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Jaya.

Selvarathinam, dkk. (2007). *Sociopolitical Instability and Economic GrowthEmpirical Evidence from Sri Lanka*. American Journal of Applied Sciences 4 (12): 1029-1035, 2007.

Sentosa Sembiring. 2007. *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung : NuansaAulia.

Siagian, Sondang P. (2005). *Manajemen Stratejik*. Jakarta : BumiAksara

Simamora, Henry. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi 2). Yogyakarta : STIE YKPN.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

Singgih, Santoso. (2006). *Buku Latihan SPSS untuk Statistik Parametrik*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Sirait. (2006). *Memahami Aspek-aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Schneider F, Bruno S F (1985). *Economic and Political Foreign Direct Investment*. World Development, 13 (2):161-175.

Solihin,Ismail. (2009). *PengantarManajemen*. Jakarta : Erlangga.

Stern. (2002). *A Strategy for Development*, Washington, D.C : World Bank.

Sugiyono. (2005). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

_____. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D*. Bandung. Alfabeta.

_____. (2010). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D*. Bandung : Alfabeta.

_____. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

_____. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tallman S B. (1998). *Home Country Political Risk and FDI*. The U.S. Journal of International Business Studies, 19 (2): 219-234.

Tambunan, Tulus. (2006). *Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi*. Artikel dalam www. kadin-indonesia.or.id. Dikutip dari: Zaenuddin, Muhammad. (2009). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi PMA di Batam*. Jurnal Jejak, Volume 2, Nomor 2, September 2009 Hal: 156-157.

T May Rudy. (2002). *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Umar, Husein. (2005). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Weber. (2005). *Aspect of the Ecology*. Jefferson.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

World Bank. (2005). *Iklim Investasi yang Lebih Baik bagi Setiap Orang, Laporan Pembangunan Dunia 2005* (The World Bank). Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Zauhar, Soesilo. (1996). *Administrasi Publik*. Malang : Universitas Negeri Malang.

© Hak cipta milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STIE IPWI Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam betuk apapun tanpa izin STIE IPWI Jakarta